2023 RENCANA KERJA

BALAI GAKKUM LHK
wilayah Kalimantan

Direktorat Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Laporan ini diterbitkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Jalan P. Untung Suropati Kompleks BDLHK, Sungai Kunjang. Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Dokumen ini merupakan Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan di tahun 2023.

Rencana Kerja 2023 ini memuat hasil hasil diskusi dalam berbagai forum yang diselenggarakan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN

NOMOR : P.1/BPPHLHK-IV/11/2022

TENTANG

RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LHK WILAYAH KALIMANTAN,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka tercapainya rencana kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023, maka kepada masing-masing satuan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023;
2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

Undang-undang….

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Kerusakan Hutan;
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/Menhut-II/2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan 2006-2025;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/KUM.1/10/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Peraturan….

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2017 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TENTANG RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2023

Pertama : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : November 2022

Kepala Balai,

Eduward Hutapea, S.Si.
NIP. 19690406 199903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
BAB I. PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
Kondisi Umum 2
Kondisi Khusus 4
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 4
C. Struktur Organisasi 6
D. Sumber Daya Manusia 8
E. Data Terpilah Sarana Prasarana 9
H. Pengarusutamaan Gender TA 2023 10
BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022 11
A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022 11
B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2022 14
C. *Automatic Adjustment* (Pencadangan Anggaran) 15
BAB III. RENCANA KERJA 2023 16
A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional 16
B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan 17
C. Pendanaan Kegiatan Tahun 2023 19
BAB IV. PENUTUP 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan 6
Gambar 2. Struktur Organanisasi 7
Gambar 3. Data terpilah SDM berdasar jenis kelamin 8
Gambar 4. Data terpilah SDM berdasar pendidikan 8
Gambar 5. Data terpilah berdasarkan Usia 9
Gambar 6. Capaian Serapan Anggaran 2021 14
Gambar 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2022 15
Gambar 8. Penyesuaian anggaran tahun 2022 15

DAFTAR TABEL

Table 1. Data terpilah Sarana dan Prasarana 9
Table 2. Road Map Balai Gakkum Kalimantan tahun 2023 10
Table 3. Capaian IKK Tahun Anggaran 2021 12
Table 4. Prognosis IKK Tahun Anggaran 2022 12
Table 5. Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 16
Table 6. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023 18
Table 7. Anggaran Kegiatan Tahun 2023 19

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan serta memantapkan pegelolaan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan (Balai Gakkum LHK Kalimantan) dengan mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: Tentang Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023.
Rencana Kerja ini memuat target capaian kegiatan yang dilakukan Balai Gakkum LHK Kalimantan secara sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Kerja ini diharapkan menjadi pedoman dan arahan umum dalam mengaktualisasi kerja-kerja penegakan hukum di Balai Gakkum LHK Kalimantan. Oleh sebab itu, perlu peran serta seluruh jajaran dan personil Balai Gakkum LHK Kalimantan untuk mengawal dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja ini.

Harapan selanjutnya adalah dapat tercapainya peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran dan personil Balai Gakkum LHK Kalimantan dalam mencapai output kinerja setiap tahunnya.

Kepala Balai Gakkum LHK
Wilayah Kalimantan

Eduward Hutapea, S.Si

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan. Tahun 2023 yang melanjutkan pelaksanaan arah pembangunan Tahun 2020 untuk keberhasilan pembangunan bidang LHK. Sejak triwulan kedua tahun 2020, hampir semua negara di dunia termasuk Indonesia, terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pembangunan pun mengalami berbagai tantangan. Begitu pun dengan kegiatan di bidang Penegakan Hukum khususnya di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan juga merasakan dampaknya.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan ketiga di dalam pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2020 – 2024 . Dokumen Renja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan ini mendukung Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dalam melaksanakan berbagai tugas yang diembankan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Untuk mencapai tugas tersebut maka setiap tahun Menyusun Perencanaan Kerja (Renja) sebagai acuan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dalam rangka mencapai indikator kinerja kegiatan.

Kondisi Umum

Sesuai dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang dipimpin oleh Seorang Kepala Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berpusat di Kota Samarinda yang wilayah kerjanya mencakup seluruh Provinsi di Pulau Kalimantan. Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terbagi menjadi 3 (tiga) Seksi Wilayah, diantaranya:

- Seksi Wilayah I, berpusat di Kota Palangkaraya dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan;
- Seksi Wilayah II, berpusat di Kota Samarinda dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara;
- Seksi Wilayah III, berpusat di Kota Pontianak dengan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Barat.

Kondisi dari segi manajemen, administrasi, dan organisasi dari setiap seksi relatif sama, karena masih dalam satu kontrol oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan. Namun, untuk kondisi lingkungan hidup dan hutan di setiap wilayah kerja seksi-seksi tersebut relatif berbeda. Untuk Seksi Wilayah I, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan akses ke lokasi kerja lebih didominasi dengan sungai. Selanjutnya, pada Seksi Wilayah II didominasi oleh kegiatan pertambangan, Hutan Tanaman Industri dan kegiatan di sekitar Wilayah Ibu Kota Negara .Untuk Seksi Wilayah III, terdapat banyak kondisi rawa gambut, perkebunan kelapa sawit dan Hutan Tanaman Industri.

Pada segi kontrol kegiatan, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan telah mendelegasikan kepada setiap seksi-seksi wilayahnya untuk melaksanakan kegiatan di masing-masing Wilayah.

Kondisi-kondisi di atas merupakan aspek utama dalam kegiatan penegakan hukum oleh Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, yang secara garis besar meliputi:

1. Peningkatan layanan pengaduan lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Peningkatan ketaatan usaha/kegiatan atas kewajiban, larangan dan/atau persyaratan mengenai pengendalian pencemaran/perusakan lingkungan hidup;
3. Pencegahan dan pengamanan asset hutan yang pengelolaannya dikuasakan kepada Kementerian LHK;
4. Penurunan tindakan pelanggaran hukum pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Kondisi Khusus

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki beberapa permasalahan yang sering menjadi kegiatan rutin dalam penanganan kasus hukum antara lain: kegiatan Illegal Logging di seluruh wilayah Kalimantan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kegiatan pertambangan ilegal yang marak terjadi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta pada tahun 2022 telah terbentuk UU Nomor 3 tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara yang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Provinsi ke Ibu Kota Nusantara yang terletak di dua Kabupaten eksisting yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara maka dari itu Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan ikut mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan pemindahan Ibu Kota Negara.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi telah dilakukan penataan birokrasi Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengamanan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyelenggarakan fungsi:

1. Inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Sosialisasi tentang adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan gangguan dan ancaman terhadap lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan rencana progam penurunan ganguan ancaman ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan;
4. Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
5. Penyelidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pemantauan dan pelaporan pelanggaran terhadap ijin lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peegakan hukum;
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Dalam menyelenggarakan fungsi penyusunan rencana progam penurunan ganguan ancaman dan pelanggaran hukum pada wilayah yang berpotensi mengalami gangguan dan ancaman kerusakan lingkungan, maka Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan membuat suatu acuan yang dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan. Sehingga, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan pada setiap awal Tahun membuat Rencana Kerja sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Kalimantan.

Keberadaan Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan dirasa sangat penting, mengingat banyaknya persoalan-persoalan di bidang LHK dan ancaman terhadap pengelolaan SDA dan LH. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian yang sungguh-sungguh terhadap upaya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, karena:

1. Tidak akan ada tata kelola yang baik tanpa penegakan hukum yang berkualitas;
2. Tidak akan ada keadilan lingkungan dan keadilan sosial tanpa penegakan hukum yang konsisten;

3. Penegakan hukum efektif dapat mewujudkan ketersediaan sumber daya produksi secara berkelanjutan; dan
4. Penegakan hukum merupakan bentuk kehadiran negara serta penerapan prinsip polluter pays principle di mana pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan harus bertanggung jawab.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pengaman dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2022 Tanggal 26 Juli 2022 tentang Organisasi dan kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Gakkum Kalimantan

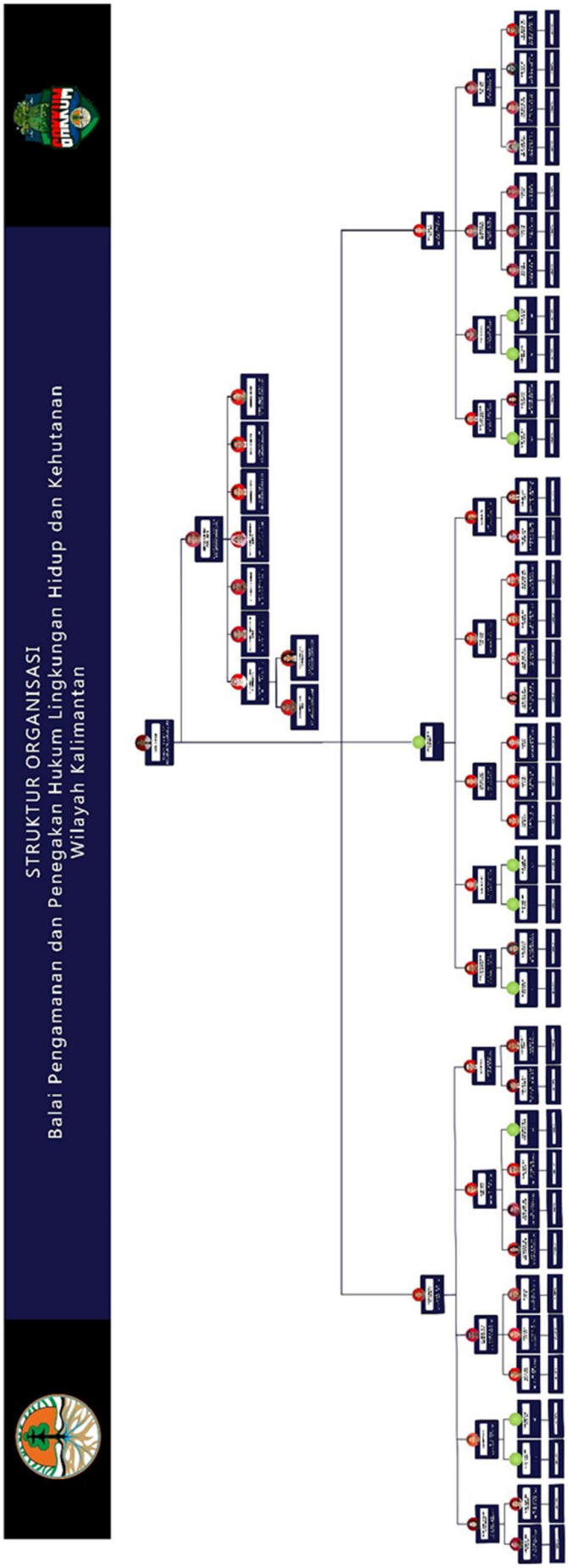

Gambar 2. Struktur Organanisasi

D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memiliki sumber daya manusia, adapun sumber daya manusia yang dimiliki tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Data Terpilah Sumber Daya Manusia Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan. Data SDM Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan per 8 Agustus 2022 berjumlah 214 orang yang terdiri dari 188 ASN, 24 PPNPN dan 2 Tenaga Kontrak, dengan komposisi pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan usia seperti tabel dibawah ini:

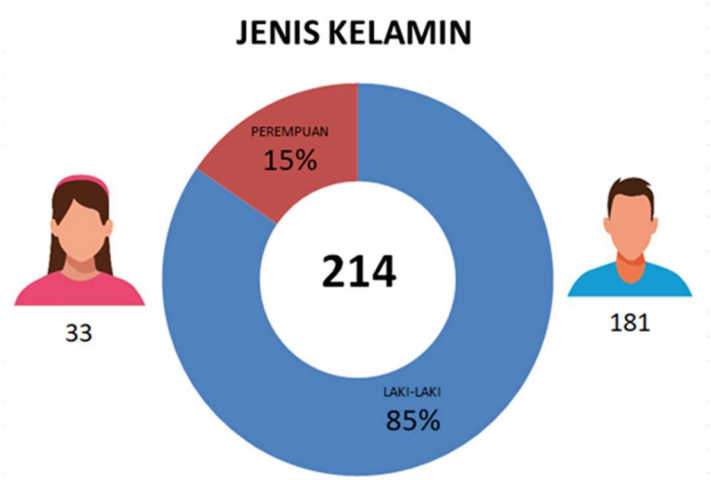

Gambar 3. Data terpilah SDM berdasar jenis kelamin

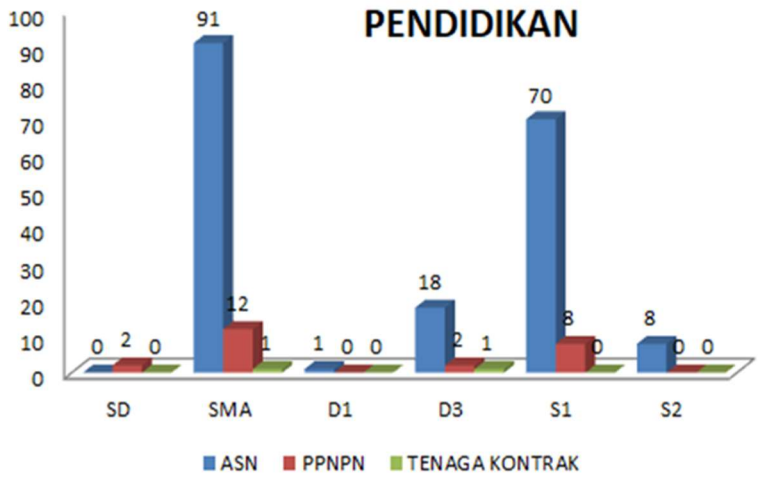

Gambar 4. Data terpilah SDM berdasar pendidikan

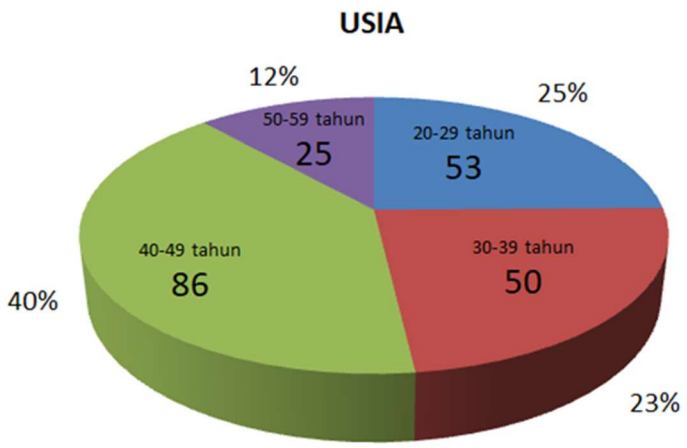

Gambar 5. Data terpilah berdasarkan Usia

E. Data Terpilah Sarana Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kerja di Lingkup Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sarana dan prasarana disediakan bagi SDM dengan sesuai dengan kebutuhan dan fungsi pelaksanaan tugas. Berikut adalah beberapa sarana penting yang tersedia di Balai Gakkum Wilayah Kalimantan

Table 1. Data terpilah Sarana dan Prasarana

	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	Total
Scanner	13	-	-	13
Kendaraan Roda 4	32	1	4	36
Kendaraan Roda 2	61	4	14	85
Handy Cam	8	-	-	8
Camera Udara	13	-	1	14
Handy Talky	39	-	-	39
GPS	59	-	2	61
Computer	29	-	2	31
Laptop	105	2	4	111
Printer	76	2	11	89

H. Pengarusutamaan Gender TA 2023

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan, dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan semua pihak dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dan pembangunan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Roadmap Pengarusutamaan Gender Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan yang menngacu pada Roadmap Ditjen Gakkum LHK Nomor P.2/PHLHK/Setjen/SET.1/5/2020 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kelembagaan PUG menjadi salah satu instrumen yang dibutuhkan dalam implementasi PUG yang ditandai dengan adanya kelompok kerja (POKJA), Gender focal point dan Gender Champion di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan.

Komitmen Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan di tahun 2023 terhadap pencapaian PUG lebih lanjut diterjemahkan melalui Road Map Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan, sebagai berikut :

Table 2. Road Map Balai Gakkum Kalimantan tahun 2023

RENCANA AKSI	RINCIAN RENCANA AKSI	TARGET 2022
1. Merencanakan Pembangunan Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana PUG	1. Mengusulkan dan menyiapkan anggaran pengadaan sarana dan prasarana responsive gender	1. Gedung Balai yang responsive Gender
2. Penyusunan dokumen data terpilah menurut jenis kelamin di UPT Balai Gakkum Kalimantan	2. Penyusunan instrumen data terpilah menurut jenis kelamin di UPT Balai Gakkum	2. 1 Dokumen

BAB II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN PROGNOSIS TAHUN 2022

A. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2021 dan Prognosis Tahun 2022

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKJ), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2022 ini, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan memiliki 4 (empat) sasaran kinerja yang akan dicapai dan diukur melalui beberapa indikator kinerja. Adapun sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Keamanan Kawasan Hutan di 5 Provinsi;
- Meningkatnya efektifitas penanganan pengaduan, pengawasan izin, izin lingkungan, izin PPLH dan PPU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi;
- Meningkatnya jumlah kasus pidana LHK yang ditangani oleh PPNS LHK secara Profesional;
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Masing-masing sasaran tersebut memiliki indikator kinerja agar pengukuran keberhasilan sasaran dapat lebih mudah dilaksanakan. Berikut disajikan Capaian Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan selama periode Tahun 2021. Pencapaian kinerja sasaran Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Tahun 2021 disajikan dan diuraikan sebagai berikut:

A.1 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Table 3. Capaian IKK Tahun Anggaran 2021

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	CAPAIAN	
			JUMLAH	%
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan Kawasan hutan	5 Operasi	21 Operasi	420 %
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar, TSL	7 Operasi	20 Operasi	285,71 %
	Peningkatan Kapasitas POLHUT	40 Orang	146 Orang	365 %
Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	91 Perusahaan	119 Perusahaan	130,76 %
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	21 Orang	420 %
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	30 Perkara	47 Perkara	156,67 %
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	4Orang	100 %
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	1 Layanan	100 %

A.2 Prognosis Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2022 Sampai dengan akhir tahun

Table 4. Prognosis IKK Tahun Anggaran 2022

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS 2022	
			JUMLAH	%
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	4 Operasi	10 Operasi	250 %
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar	6 Operasi	9 Operasi	150 %

KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS 2022	
			JUMLAH	%
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	40 Orang	150 Orang	375 %
	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	139 Perusahaan	111 Perusahaan	79,85 %
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	19 Orang	380 %
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	26 Perkara	34 Perkara	131 %
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	4 Orang	44 Orang	1.100 %
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	100 %
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1 Layanan	1 Layanan	100 %

B. Capaian Serapan Anggaran Tahun 2021 dan Prognosis Serapan Anggaran Tahun 2022

Tren Pagu Anggaran memiliki pengaruh signifikan seiring pandemi Covid – 19 di Tahun 2021 sebesar 41.649.896.000,- dan tetap berlanjut di Tahun 2022 sebesar 41.933.161.000,0 termasuk adanya kebijakan *Automatic Adjustment* di dalamnya.

	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)
Anggaran	19.553.470.000	19.718.857.000	2.377.569.000
Realisasi Anggaran	19.523.818.698	19.667.542.584	2.372.553.594

Gambar 6. Capaian Serapan Anggaran 2021

B.2 Prognosis Capaian Serapan Anggaran Tahun 2022

Pada Tahun 2022 Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan memperoleh anggaran sebesar 41.933.161.000, - . Namun dengan diberlakukannya *automatic adjustment (AA)* sebanyak dua kali menjadikan berkurangnya ruang penggunaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Selain karena *automatic adjustment* anggaran Balai Gakkum Wilayah Kalimantan juga mengalami penyesuaiaan karena penambahan belanja pegawai dan realokasi *automatic adjustment* belanja pegawai. Serapan Balai Gakkum Kalimantan diprognosiskan 99,66 % dari total pagu anggaran tanpa *automatic adjustment* (AA). Untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran dan capaian kinerja, pada akhir tahun

Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan melakukan revisi anggaran antar output untuk dapat memaksimalkan serapan anggaran.

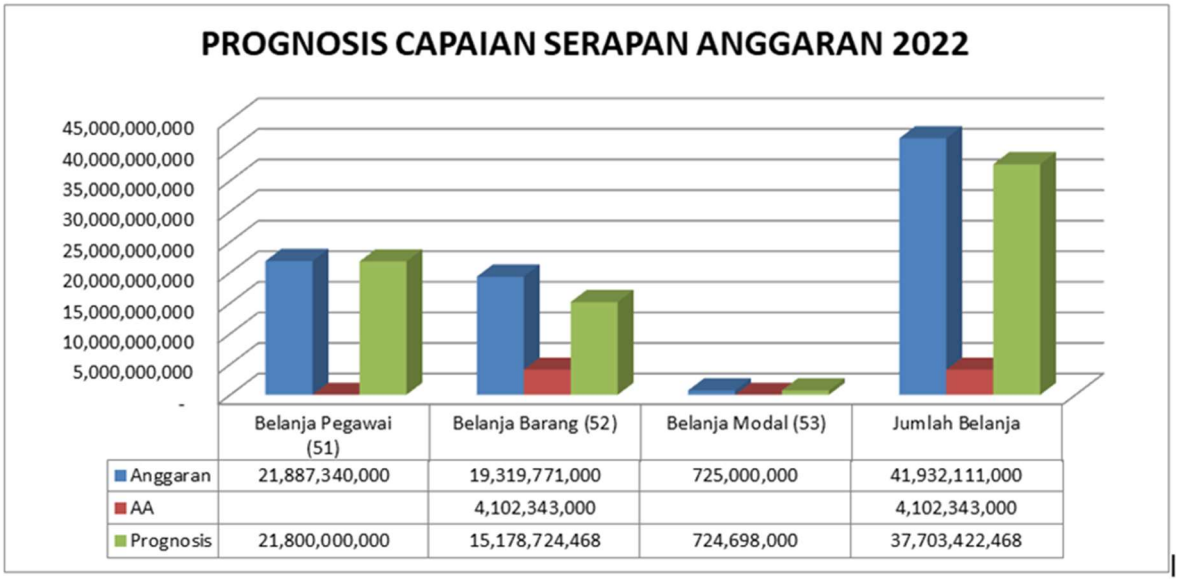

	Belanja Pegawai (51)	Belanja Barang (52)	Belanja Modal (53)	Jumlah Belanja
Anggaran	21,887,340,000	19,319,771,000	725,000,000	41,932,111,000
AA		4,102,343,000		4,102,343,000
Prognosis	21,800,000,000	15,178,724,468	724,698,000	37,703,422,468

Gambar 7. Prognosis Capaian Serapan Anggaran 2022

C. *Automatic Adjustment* (Pencadangan Anggaran)

Dijelaskan dalam Renja Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan tahunan kedua di dalam Pelaksanaan Rencana Strategi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan serta turut menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan tentang Pencadangan Anggaran Belanja K/L TA 2022, Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan mendapat mandat untuk melakukan Pencadangan Anggaran. Proses pencadangan pagu anggaran Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2022 sebagai berikut :

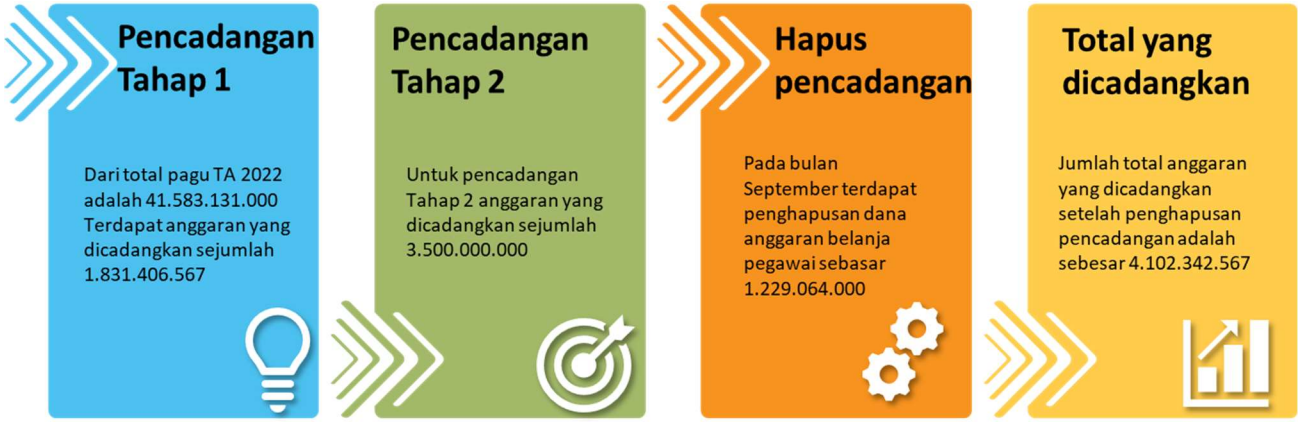

Gambar 8. Penyesuaian anggaran tahun 2022

BAB III. RENCANA KERJA 2023

A. Strategi Dalam Mendukung Program KLHK dan Prioritas Nasional

1. RPJMN 2020 s.d 2024

RPJMN 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis (Major Project–MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP Tahun 2023 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Empat rumusan Sasaran Strategis Kementerian LHK beserta dua puluh Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian LHK Tahun 2020-2024 adalah:

Table 5. Rumusan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KERJA UTAMA
1.	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	1. Indeks Kualitas Li ngkungan Hidup (IKLH) 2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang Terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah 3. Penurunan Laju Deforestasi 4. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 5. Luas Lahan dalam DAS yang Di pulihkan Kondisinya 6. Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HVC – Hi gh Conservation Val ues)
2.	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	7. Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional 8. Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan *Bioprospecting* 9. Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3.	Terjaganya keberadaan, fungsi, dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan bekelanjutan	10. Luas Kawasan Hutan dengan status Penetapan 11. Luas Kawasan Hutan yang dilepas untuk

		Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) 12. Luas Kawasan Hutan yang dikelola oleh Masyarakat
4.	**Terselenggaranya tata kelola dan inovasi Pembangunan LHK yang baik serta kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing**	13. Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan **14. Jumlah Kasus LHK yang ditangani melalui Penegakan Hukum** 15. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE) 16. Hasil Litbang yang inovatif atau implementasi 17. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi 18. Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK 19. Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK 20. Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) KLHK

B. Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan merupakan unit Pelaksana Teknis Dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga dalam susunan Rencana Kerjanya tidak lepas dari sasaran kegiatan Ditjen Penegakan Hukum LHK. Adapun sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah “Menurunkan Gangguan, Ancaman dan Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan”

Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan melaksanakan Sasaran Kegiatan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan. Oleh karena itu perlu di tetapkan Indikator Kinerja Unit Pelaksana Teknis, dimana kegiatan dan targetnya akan dipengaruhi oleh Rencana Kerja Pemerintah di tahun tahun ke depan, sehingga Kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis akan Sinergis dengan Kegiatan di Pusat.

Dalam rangka untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut disusun rencana kerja yang terdiri dari beberapa indikator kegiatan, Output dan Komponen Kegiatan dari

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK wilayah Kalimantan Tahun 2023, sebagai berikut:

Table 6. Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2023

Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Satuan
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	18	Operasi
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar	5	Operasi
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang
Pencegahan dan Pengamanan Hutan Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	134	Perusahaan
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10	Orang
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	38	Perkara
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Orang
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja	1	Layanan

C. Pendanaan Kegiatan Tahun 2023

Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Tahun 2023, diperlukan anggaran dengan komposisi pada tabel berikut. Dengan sumber pendanaan untuk kegiatan di Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan berasal dari rupiah murni (RM) sebesar 50.989.130.000 (92,14%) dan dari PNBP sebesar 4.350.000.000 (7,8%).

Table 7. Anggaran Kegiatan Tahun 2023

Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Komponen	Target	Satuan	Anggaran
Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah Operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup		18	Operasi	6.800.000.000
		Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan dan Hasil Hutan			300.000.000
		Operasi Pengamanan Kawasan Hutan			6.500.000.000
	Jumlah Operasi Pembalakan Liar		5	Operasi	1.995.000.000
		Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan			250.000.000
		Sosialisasi dan Kerjasama PPH			100.000.000
		Operasi Pembalakan Liar			600.000.000
		Operasi Tumbahan dan Satwa Liat			445.000.000
		Penguatan Sistem Intelijen			100.000.000
		Dukungan Teknis PPH			500.000.000
	Jumlah Polhut yang ditingkatkan kapasitasnya		15	Orang	200.000.000
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK			200.000.000
Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		134	Badan Usaha	
		Penanganan			861.000.000

Meningkatnya pelaku usaha/kegiatan yang diawasi terhadap perizinan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	ketaatannya terhadap perundang-undangan bidang LHK	Pengaduan Perusahaan			
		Penanganan Pengaduan Non Perusahaan			950.000.000
		Pengawasan Bidang LHK			1.700.000.000
	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya		10	Orang	
		Peningkatan Kapasitas PPLH bidang LHK			100.000.000
Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai P-21	Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21		38	Perkara	
		Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK			550.000.000
		Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana LHK			400.000.000
		Pengumpulan bahan dan keterangan			3.200.000.000
		Penyidikan Kasus tindak pidana LHK			4.200.000.000
		Dukungan teknis PHP LHK			1.650.000.000
	Jumlah PPNS yang ditingkatkan kapasitasnya		5	Orang	
		Peningkatan PPNS LHK			20.000.000
Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Penegakan Hukum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran		1	Layanan	
		Gaji dan Tunjangan			26.537.309.000
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3.225.821.000
	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen satuan kerja		1	Layanan	
		Layanan Dukungan Manajemen Satker			950.000.000

BAB IV. PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

Semangat pengelolan kolaboratif dari pihak (*stakeholders*) merupakan modal utama dalam mengusung sasaran kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Kalimantan adalah "Pencegahan dan Pengamanan Hutan" dan "Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perlu disadari bahwa RENJA ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa Kelemahan. Oleh Sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnan penyusunan RENJA tahun berikutnya.

Dengan RENJA ini diharapkan tercapai optimalisasi peran dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja sehingga tercapai sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pengendalian kinerja seluruh jajaran di lingkungan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan.

LAMPIRAN MATRIK RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN

SEKSI WILAYAH I PALANGKA RAYA

TAHUN 2023

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	KRO	RO	Lokasi	Komponen	Sub Komponen	Target dan Satuan (di isi Balai)	Anggaran
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(11)*	*(12)*
	029.10.FD Kualitas Lingkungan Hidup									***13.131.000.000***
1	5430 - Penanganan Pengaduan, Pengawasan Sanksi Administrasi	Terawasinya Usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang undangan terkait bidang LHK	Peningkatan Kapasitas PPLH	DCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 - Peningkatan kapasitas PPLH bidang LHK	Palangka Raya - Kalteng	054 - Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PPLH	Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PPLH	10 Orang	100.000.000
			Pengawasan Ketaatan LHK pada Badan Usaha	QIH - Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha	001 - Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan,	057 - Penanganan Pengaduan Perusahaan	Penanganan Pengaduan Perusahaan	134 Badan Usaha	861.000.000
							059 - Penanganan Pengaduan Non Perusahaan	Penanganan Pengaduan Non Perusahaan		950.000.000
							061 - Pengawasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pengawasan LHK		964.400.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPSA		202.800.000

						Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat		Operasional Penanganan Pengaduan/Pengawasan Karhutla		37.500.000
								Ekspose PPSA BPPHLHK Wilayah Kalimantan		495.300.000
2	5431 - Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21	Peningkatan kapasitas PPNS	DCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001 - Peningkatan Kapasitas PPNS	Palangka Raya - Kalteng, Samarinda - Kaltim, Pontianak - Kalbar	058 - Peningkatan PPNS LHK	Perjalanan Dinas Peningkatan Kapasitas PPNS	5 Orang	20.000.000
			Kasus Tindak Pidana LHK P21	QCE - Penanganan Perkara	001 - Kasus Tindak Pidana LHK P21	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu	051 - Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	Pra Peradilan Kasus Tindak Pidana LHK	38 Perkara	550.000.000
							052 - Fasilitasi penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PHP		400.000.000
							056 - Pengumpulan Bahan dan Keterangan atas Dugaan Tindak Pidana LHK	Pengumpulan Bahan dan Keterangan Tindak Pidana LHK		965.190.000
								Penanganan Barang Bukti Kasus Tindak Pidana LHK		1.701.810.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PHP		533.000.000

						Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	057 - Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK	Kegiatan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP)		564.400.000
								Gelar Perkara Kasus Tindak Pidana LHK		129.360.000
								Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ke Kejaksaan (Tahap II)		619.200.000
								Operasional Penyidikan		2.059.040.000
								Press Release		37.800.000
								Pemantauan Persidangan		290.200.000
								Dukungan Teknis Penegakan Hukum Pidana LHK		1.650.000.000
	029.10.FF Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									**6.195.000.000**
3	5428 - Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan ilegal	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	DCE - Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001 - Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	Palangka Raya - Kalteng, Samarinda - Kaltim, Pontianak - Kalbar	051 - Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan LHK	Pelatihan Menembak	15 Orang	200.000.000
			Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	QHB - Operasi Bidang Keamanan	001 - Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito	051 - Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan dan Hasil hutan	Pengumpulan Data dan Informasi	18 Operasi	256.200.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		43.800.000

						Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	052 - Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan	Operasi Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK		1.020.250.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		392.600.000
								Operasional Kegiatan Pengamanan		60.600.000
								Pengumpulan Data dan Informasi Wilayah IKN		588.800.000
								Operasi Pengamanan Kawasan Wilayah IKN		1.148.400.000
								Supervisi Wilayah IKN		359.600.000
								Rapat Pembahasan Pengamanan IKN		129.750.000
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal		002 - Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab.	051 - Pengumpulan Data dan Informasi	Pengumpulan Data dan Informasi	5 Operasi	241.530.000

						Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat	Peredaran Hasill Hutan Illegal	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		8.470.000
							053 - Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		100.000.000
							059 - Operasi Pembalakan Liar	Operasi Pembalakan Liar		417.100.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		182.900.000
							055 - Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar	Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar		417.100.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		27.900.000
							056 - Penguatan Sistem Intelijen	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		100.000.000
							057 - Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Pelaksanaan Tes Psikologi Pemegang Senjata Api		105.600.000
								Pengurusan Administrasi Senjata Api		46.400.000

								Pengurusan Administrasi Pemegang Senjata Api		44.400.000
								Kesamaptaan Polhut		39.000.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi Bidang PPH		264.600.000
	029.10.WA Dukungan Manajemen									**27.975.821.000**
4	5427 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan Ditjen Gakkum LHK	Layanan Umum	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal	962 - Layanan Umum	Kota Palangka Raya, Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawringin Barat, Kab. Kab. Lamandau, Kab. Seruyan, Kab. Kapuas, Kab. Gunung Mas, Kab. Pulang Pisau, Kab. Sukamara, Kab. Barito Utara, Kab. Barito Selatan, Kab. Barito Timur, Kab. Murung Raya - Provinsi Kalimantan Tengah. Kab. Tanah laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. banjar, Kab. Banjarbaru - Prov. Kalimantan Selatan Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, PPU, Paser, Berau, Kutai Barat, Bontang, Tarakan, Bulungan, Malinau, Nunukan, Kab.Tanah Tidung. Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kab. Kubu	062 - Layanan Dukungan Manajemen Satker	Penyusunan Dokumen dan Laporan	1 Layanan	6.000.000
								Perjalanan Dinas Koordinasi dan Konsultasi terkait Program dan Anggaran, Evaluasi, Keuangan, Kepegawaian, BMN, dll		820.000.000
								Penanganan Pandemi Covid-19		8.000.000
								Sosialisasi Gakkum		100.000.000
								Penataan Pengarsipan Dokumen		16.000.000

						Raya, Kab. Ketapang, Kab. Mempawah, Kab. Kayong Utara, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Prov. Kalimantan Barat				
			Layanan Perkantoran Unit Pelaksana Teknis (UPT)		994 - Layanan Perkantoran Setditjen PHLHK	Palangka Raya - Kalteng, Samarinda - Kaltim, Pontianak - Kalbar	001 - Gaji dan Tunjangan	-	1 Layanan	23.800.000.000
							002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		3.225.821.000
										47.301.821.000

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH KALIMANTAN
Komplek Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Samarinda,
Jl. P. Untung Suropati, Kec. Sungai Kunjang Samarinda – Kalimantan Timur
e-mail: bp2hlhk.kalimantan@gmail.com